



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

Nama SOP	007-1/ ADPIM. II/ III/ 2021
Tgl. Pembuatan	30 Maret 2021
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	1-Apr-21

Disahkan oleh



Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan,

SUTOYO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19791011 200012 1 001

BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Nama SOP

SOP Pengujian Tentang Konsekuensi

Dasar Hukum

1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Nomor 487.22/163/ADPIM.II/III/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan.
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/ Perlengkapan

1. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
2. Softcopy Dokumen Informasi Publik Yang Dikecualikan
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Biro/Setda

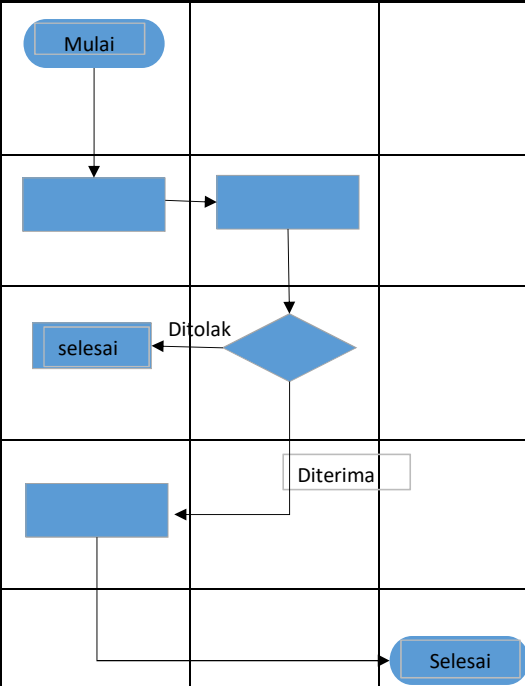
Peringatan :

1. Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah Salah Satu Tugas PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan Informasi tidak berjalan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

SOP Pengujian Tentang Konsekuensi

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan PPID.				Dokumen Informasi Publik, peraturan perundang-undangan	3 hari	Konsep/ kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP.				Konsep/ kajian	1 hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup.				Dokumen Informasi Publik, peraturan perundang-undangan	1 hari	Surat Penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan ke atasan PPID.				Konsep SK	14 hari kerja	Konsep keputusan atasan PPID/ PPID	Dapat berupa keputusan PPID
5	Menetapkan keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan.				Konsep SK	1 hari kerja	Keputusan Atasan PPID	